

POLA PEMBINAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Linda Fajarwati

Key Words: pattern, guidance, non-formal education program (*Pendidikan Non Formal/ PNF*)

Guidance program of non-formal education at nine regencies in Gresik was still low that causes many programs could not be developed well. Those become boundaries for the continuity of non-formal education in Gresik. However, non-formal education program (PNF) in Driyorejo regency has been developed well. It is because of guidance from Out of School Education figures, society figures, and PKBM boards. The guidance was done for the purpose to make all the programs that were going to be hold would be appropriate with the plans or they would not out of the plans that had been decided before. Concerning on the reality above, it could be seen that the guidance that had been done by both the government and the society were very important. Because of the reasons previously mentioned, the guidance system of non-formal education at *PKBM Baitul Muslimin*, Driyorejo, Gresik is the interesting to study. This study was focused on the main problems on how “Procurement Guidance System of Non-Formal Education (at PKBM Baitul Muslimin, *Kecamatan Driyorejo, Gresik*).” This study had purposes to describe: (1) how are the indicators of the successful of *PKBM Baitul Muslimin*, (2) how are the factors supporting the success of *PKBM Baitul Muslimin*, (3) how are the pattern of procurement program of non formal education program at *PKBM Baitul Muslimin*, (4) what meaning that can be constructed from guidance pattern at *PKBM Baitul Muslimin*.

This study applied qualitative research that is case study. The technique that was used to determine the informant was snowball sampling technique. The subjects of this study were all elements that support the procurement of all non-formal education programs at *PKBM Baitul Muslimin* such as the controllers from Out of School Education (*PLS*), society figures, board of PKBM, teachers, TLD and the programmers. The data collections were obtained by depth interview, observation, and documentation study. The data was analyzed by using (1) data reduction, (2) data descriptions, and (3) drawing conclusion.

The results of this study were: (a) procurement program of non- formal education, (b) programs that are served based on the society’s need, (c) the learning process was based on the religion aspects, (d) applied PDCA management strategy.

From the results of this study, some suggestions were offered: (1) for the people who in charger to program the non-formal education, it was suggested to design pattern of guidance which is appropriate with the condition and the background of the surrounding society. The guidance cannot be done by using top-down procedure rather it was suggested to know the condition of the society in which the programs would be conducted., (2) for the people who involve in the procurement guidance program for non-formal education, it was suggested to always improve the guidance and the management strategy so that all non-formal education programs can continue like what wished, (3) for the other researchers, it was suggested to continue the results of this study and the researcher would be opened to share.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi Direktorat Jendral PNFI adalah “Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketenagaan yang profesional, dan satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi agar mampu menjangkau sasaran yang semakin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang”. Untuk mewujudkan misi tersebut, Pendidikan Non Formal sebagai salah satu jalur pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaannya dilapangan tentunya membutuhkan peran berbagai unsur pendidikan yang terkait. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal diantaranya; penilik, pamong belajar, TLD (Tenaga Lapangan Dikmas), tutor, instruktur, fasilitator, Nara Sumber Teknis dan pengelola PKBM.

Namun, problematika yang saat ini berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dimasyarakat adalah banyaknya program-program PNFI yang on-off, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hamid Muhammad, Dirjen PNFI dalam Kuliah Umum di Pascasarjana UM (November 2009) mengatakan bahwa “keresahan yang berkembang di Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal adalah banyak bermunculan program-program Pendidikan Non Formal yang on-off artinya program yang aktif jika memperoleh kucuran dana dan program tersebut tidak aktif pada saat dilakukan monitoring, program tersebut biasanya disebut sebagai program siluman artinya program yang dapat menghilang setiap saat”.

Dalam kesempatan yang berbeda yaitu “Sosialisasi Penertiban Program PNFI” pada bulan februari 2010, Kementrian Pendidikan Nasional Dirjen PNFI menyebutkan bahwa banyak PKBM yang fiktif alias bodong atau siluman, ketika dilakukan kunjungan langsung, ternyata PKBM tersebut sudah berubah fungsi. Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan bahwa sebagian besar PKBM di beberapa daerah banyak berubah fungsi

menjadi rumah tinggal atau rumah makan dan ribuan program-program PNFI yang fiktif, seperti contohnya lembaga kursus. Awalnya, jumlah lembaga kursus yang terdata di Depdiknas mencapai 13 ribu tapi setelah dilakukan pendataan ulang berkurang dua ribu lembaga. Jadi lembaga kursus yang berjumlah dua ribu tersebut adalah fiktif, terang Hamid kepada INDOPOS pada bulan februari 2010. <http://www.diknas.go>. (diakses pada 4 April 2010). Jadi dapat dikatakan tidak kurang dari 40 % program yang tersebar di Indonesia ini adalah program fiktif sehingga salah satu rencana yang disusun oleh jajaran Dirjen PNFI adalah penertiban program PNFI dengan melakukan pendataan program-program yang masih aktif dan memberlakukan Nomor Induk Lembaga (NIL) dan hanya lembaga yang memiliki NIL tersebut yang akan memperoleh pembinaan. <http://www.diknas.go.id> (diakses pada 26 Agustus 2015).

Permasalahan yang kedua adalah lemahnya pembinaan atau pengawasan pada program PNFI baik dari jajaran Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Non Formal Informal, penilik PNFI, dan tokoh masyarakat. Jajaran Dinas Pendidikan sebagai pembina pertama di tingkat Kabupaten yang membawahi program PNFI mempunyai peran yang besar dalam pemberian izin penyelenggaraan dan monitoring pelaksanaan program. Selain itu, peran serta penilik dalam membina program PNFI seperti dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Pasal 40, bahwa pengawasan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan. Artinya, seseorang yang menduduki jabatan penilik secara yuridis sebagai pengendali mutu dan sebagai pengawas pada satuan Pendidikan Non Formal. Begitu juga peran serta tokoh masyarakat, program PNFI mempunyai filosofi dari, oleh dan untuk masyarakat yang berarti bahwa tokoh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat turut mempunyai peran dalam membina program PNFI.

Hasil studi observasi pada bulan Agustus-September 2015 di beberapa program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gresik antara lain Kecamatan Bungah, Sidayu, Dukun,

Ujung Pangkah, Kedamaian, Manyar, Duduk Sampean, Menganti, dan Legundi, beberapa informasi dari penyelenggara mengungkapkan bahwa selama ini dirasakan belum memperoleh pembinaan, pengawasan dan pembimbingan yang baik dari pembina PNFI. Terutama penilik yang tidak melakukan kunjungan secara rutin, seringkali penilik hanya datang pada waktu pembukaan dan penutupan program. Adapun selama pelaksanaan program, penilik sama sekali tidak melakukan pembinaan ataupun monitoring, hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan dan keluh kesah bagi penyelenggara yang seharusnya mendapatkan pembinaan secara baik dan berkesinambungan. Dua permasalahan tersebut merupakan suatu penghambat dari keberlangsungan program PNF karena keterlibatan semua unsur sangat membantu terlaksananya program PNF dengan baik.

Namun, kenyataan yang terjadi di sembilan kecamatan tersebut sangat berlawanan dengan informasi yang diperoleh dari penyelenggara Pendidikan Non Formal di Kecamatan Driyorejo, yang mengatakan bahwa selama ini memperoleh pembinaan yang sangat baik dari penilik dan tokoh masyarakat, sehingga keberadaan program-program PNF berkembang cukup pesat. Data tersebut didukung dengan pernyataan dari Bapak Drs. Sya'roni Ruchan, M.Pd selaku Kasi Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang mengatakan bahwa dari delapan belas Kecamatan di Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo yang program PNF-nya paling berkembang, salah satunya adalah PKBM Baitul Muslimin Kecamatan Driyorejo. Semenjak PKBM tersebut didirikan pada tahun 2000, masing-masing program sudah memiliki cabang yang diselenggarakan didesa lain, peserta didik yang mengikuti program pun tidak hanya berasal dari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik melainkan dari luar kota seperti Sidoarjo dan Surabaya, dan pada tahun 2008 PKBM Baitul Muslimin mewakili Jawa Timur mengikuti lomba PKBM tingkat Nasional dan meraih juara pertama lomba PKBM se-Indonesia.

Endro Haryanto (2007) mengemukakan bahwa pendidikan non formal dapat dilaksanakan apabila semua unsur terkait saling bahu membahu dalam penyelenggaraannya termasuk didalamnya peran PTK PNF. Selain itu, Kamid Asngadi (2003) juga mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kinerja pembina PLS dengan penyelenggaraan program Paket B. Kinerja pembina dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sangat menentukan keberlangsungan program-program PLS, namun jika hal tersebut dilakukan dengan proses yang tepat dan berkesinambungan.

Hasil temuan penelitian Russaly A. Emon (2003) menyebutkan bahwa program kolompok usaha belum dapat meningkatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diinginkan karena sistem pengelolaan program yang belum tepat sehingga masih memerlukan perhatian dan pembinaan dari pihak pemerintah dan swasta untuk membantu meningkatkan keberhasilan program. Begitu juga hasil penelitian Sri Agus Sulistyowati (2005) ditemukan bahwa keberhasilan program kelompok belajar usaha di Yayasan Sanusiyah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga dan tokoh masyarakat.

Memperhatikan rasional hasil penelitian diatas yang menyebutkan bahwa betapa pentingnya suatu pembinaan yang dilakukan oleh pihak-pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dan ditopang kenyataan di lapangan yaitu program-program PNF di Kecamatan Driyorejo yang sukses dan berkembang dengan baik sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara obyektif tentang format pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Baitul Muslimin Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Jawa Timur, dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Jenis penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Terdapat tujuh belas nara sumber wawancara, terdiri dari satu orang penilik PNF, satu orang TLD, satu orang tokoh masyarakat, satu orang pengelola PKBM, Kepala UPTD dan 12 ketua program PNF.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, program-program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin pada dasarnya juga didukung oleh faktor-faktor diantaranya: (a) kelembagaan PKBM, (b) sarana prasarana yang memadai, (c) sumber daya manusia yang berkualitas, (d) strategi manajemen, (e) partisipasi masyarakat, (f) pendanaan dari kerjasama, (g) sosialisasi, (h) keterkaitan semua unsur, (i) manfaat untuk masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak begitu saja ada namun membutuhkan proses sehingga sampai pada suatu kondisi dimana faktor-faktor tersebut muncul sebagai daya pendukung.

Tanpa adanya dukungan faktor-faktor tersebut diatas, PKBM Baitul Muslimin tidak akan dapat bertahan. Beberapa informan menyebutkan bahwa faktor pendukung yang paling besar dalam keberhasilan PKBM Baitul Muslimin adalah karena keterkaitan antara unsur-unsur di PKBM karena unsur-unsur tersebut yang akan membawa pada tujuan yang semestinya. Unsur-unsur dalam PKBM mencakup peraturan, kebijakan, pengelola, tenaga penyelenggara, staf, tutor, biaya, serta perangkat lainnya. Faktor pendukung lain dalam penelitian ini adalah kerjasama yang kuat antara pihak lembaga dengan instansi-instansi atau perusahaan sehingga dukungan baik berupa materi maupun motivasi terus memberikan nuansa yang membangun bagi keberadaan PKBM. Kerjasama dan kemitraan dalam PKBM adalah hal yang penting terutama dalam mengembangkan dan membangun program-program baru. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai komponen masyarakat atau

lembaga-lembaga lain terutama untuk mendapat bantuan sumber daya manusia, financial maupun material.

Namun masih ada hal lain yang tidak kalah pentingnya meskipun terkadang terlihat mudah yaitu strategi, strategi merupakan suatu cara atau trik yang mampu memberikan jalan menuju pencapaian yang diinginkan, dalam penelitian ini faktor pendukung yang lain adalah menerapkan strategi manajemen. Sampai saat ini salah satu kelemahan pendidikan non formal di Indonesia adalah karena lemahnya penerapan manajemen, padahal penerapan manajemen sangatlah penting untuk keberlangsungan sebuah program. Dalam penelitian ini pola pembinaan yang dilakukan pada penyelenggaraan program pendidikan non formal adalah perpaduan antara manajemen dan kondisi atau latar belakang masyarakat.

Pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal hasil temuan dalam penelitian ini mencakup empat hal yaitu: a) pembinaan program pendidikan non formal selalu melibatkan tokoh masyarakat, b) penyelenggaraan program pendidikan non formal berdasarkan kebutuhan masyarakat, c) pembelajaran pendidikan non formal berbasis agama dan d) menggunakan strategi manajemen PDCA. Berikut paparan mengenai pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin;

a. Pembinaan program pendidikan non formal melibatkan tokoh masyarakat

Dalam penelitian ini, pembinaan program-program pendidikan non formal selalu melibatkan tokoh masyarakat, baik itu Kepala Desa, Camat, Kiai, guru dan ustadz yang ada di sekitar PKBM. Pelibatan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin ini berperan sebagai faktor penarik warga masyarakat untuk turut serta mengikuti program-program. Tokoh masyarakat sebagai orang yang dihormati, dapat meyakinkan warga belajar bahwa program tersebut suatu saat akan memberikan manfaat bagi kehidupan, sehingga dengan keyakinan tersebut warga belajar

akan tertarik untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan di PKBM Baitul Muslimin.

b. Penyelenggaraan program pendidikan non formal berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan non formal tidak lepas dari pemilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin ini juga memperhitungkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemilihan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjadi daya tarik bagi warga belajar yang akan memunculkan motivasi dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan.

Pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dalam menyusun program pemberdayaan didasarkan atas beberapa hal yaitu: 1) kebutuhan adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena manusia hidup untuk memenuhi kebutuhannya, 2) keberhasilan manusia dalam hidup lebih banyak ditentukan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, 3) manusia melakukan upaya berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan, 4) dalam suatu kebutuhan terdapat kebutuhan lain yang harus dipenuhi (Sudjana 1991:139-140).

c. Program pendidikan non formal berbasis agama

Pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal juga perlu memperhatikan rasi atau rangsangan belajar bagi warga belajar, karena dengan rasi tersebut dapat menimbulkan minat bagi warga belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal yang membuat warga belajar di PKBM Baitul Muslimin berminat mengikuti program-program pendidikan non formal adalah pengetahuan agama, sehingga sampai saat ini semua program pendidikan non formal yang diselenggarakan di PKBM Baitul Muslimin ini berbasis agama, artinya pada setiap pembelajaran tutor selalu memadukan antara materi dengan

pengetahuan agama. Hal ini disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan agama sebagai sesuatu yang penting.

d. Menerapkan strategi manajemen PDCA

Selanjutnya adalah menerapkan strategi manajemen, strategi yang dimaksud disini adalah sebagai kiat atau cara yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan PKBM. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan dalam membina program-program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin adalah manajemen PDCA. Harsey dan Blanchard (dalam Gaffar 2007:569) mendefinisikan manajemen sebagai proses kerja sama melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang diterapkan pada semua bentuk dan jenis organisasi. Sedangkan PDCA (Hamzah 2011) adalah suatu proses pemecahan masalah empat langkah yang terjadi dalam setiap kegiatan atau kinerja yang merupakan siklus yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Namun ada juga yang mengatakan bahwa PDCA adalah salah satu cara untuk meningkatkan perbaikan atau peningkatan proses. <http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA>

Manajemen PDCA terdiri dari empat langkah yaitu *Plan, Do, Check and Action*. *Plan*, meski secara literal tahapan ini berarti “merencanakan”, *plan* dalam PDCA merupakan proses mendesain atau merevisi komponen proses guna meningkatkan hasil. Bila digunakan dalam konteks pemecahan masalah, maka *plan* berarti mengidentifikasi masalah. *Do*, berarti implementasi dari desain atau bertindak. Pada konteks PDCA, *do* merupakan tahapan mengimplementasikan desain yang telah dibuat pada tahapan *plan*. Bila PDCA diterapkan pada pemecahan masalah, maka *do* merupakan tahapan di mana berbagai solusi ditemukan atau diajukan dan diujicobakan efektifitasnya. *Check*, pada dasarnya, *check* mempelajari atau menilai efektifitas pelaksanaan rencana-rencana baru atau berbagai solusi yang sudah diujicobakan. *Action*, bukan sekedar bertindak atau melakukan, namun, dalam konteks PDCA, *act* merupakan pelaksanaan penuh atas rencana yang terbukti memberi peningkatan

hasil atau solusi yang terbukti ampuh dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. (<http://pdca-plan-do-check-act.html>).

Pola pembinaan yang dilakukan pada penyelenggaraan program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin disertai dengan cara dan pendekatan tertentu, hal ini dilakukan supaya semua pengurus dan penyelenggara menyatu dan tidak ada pembatas antara ketua PKBM dan penyelenggara program. Ketika membina pelaksanaan program, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan langsung (*direct contact*), artinya pembina memberikan pengarahan secara langsung atau *face to face*, dan pendekatan tidak langsung (*indirect contact*) yaitu pembinaan dilakukan secara tidak langsung atau tidak bertatap muka. Adapun cara yang digunakan dalam pembinaan adalah keterpaduan dari dua cara yaitu secara individu dan berkelompok, tergantung pada konteks yang dibina. Jika hal yang dibina itu sifatnya rahasia dan individu, maka pendekatan yang digunakan adalah individu, namun jika hal yang dibina merupakan masalah umum maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berkelompok.

Pembinaan yang dilaksanakan pada program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin juga menggunakan konsep *Andragogy* (Knowles 1998:203) *self directing learning* yaitu kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri untuk belajar. Hal ini terlihat dari pendekatan dan cara yang digunakan oleh pembina pada saat memberikan pembinaan kepada penyelenggara atau pelaksana dan tutor. Dimana pembina masih memberikan kebebasan yang terkontrol untuk melakukan suatu tindakan yang menurut penyelenggara itu baik bagi perkembangan program pendidikan non formal yang ada dibawah tanggungjawabnya.

Dapat dikatakan bahwa pembina tidak memperlakukan orang yang dibina seolah anak kecil namun orang dewasa yang hanya perlu didampingi untuk melaksanakan tanggungjawabnya, karena salah satu ciri orang dewasa adalah lebih suka belajar dengan orientasi *problem solving* dari pada belajar secara terpusat. Jika dikaitkan dengan kegiatan

pembinaan ini, ada kebiasaan rutin yang dilakukan di PKBM Baitul Muslimin yaitu evaluasi setiap dua bulan sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan keseluruhan program yang dilaksanakan di PKBM Baitul Muslimin. Dalam evaluasi tersebut, penyelenggara diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi namun juga diberikan kesempatan untuk mencari solusi secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa pembina memperlakukan orang yang dibina sebagai orang dewasa yang belajar dari permasalahannya sendiri dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin yang terdiri dari empat hal yaitu: 1) melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal, 2) program yang diselenggarakan berdasarkan atas kebutuhan warga belajar, 3) program yang diselenggarakan berbasis agama artinya disisipi dengan pengetahuan agama, 4) menerapkan strategi manajemen PDCA. Pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal yang disebutkan diatas mempunyai alasan-alasan tertentu, diantaranya adalah karena adanya kecocokan antara strategi manajemen yang digunakan dengan program PNF. Maksudnya bahwa program pendidikan non formal yang sifatnya lebih fleksibel tersebut dirasa cocok jika dibina dengan menggunakan manajemen PDCA, empat langkah yang sederhana namun penuh dengan langkah-langkah cepat. Dengan cara tersebut segala bentuk permasalahan dapat cepat diketahui, karena langkah ke tiga yaitu *Check* diwujudkan dalam bentuk evaluasi rutin setiap dua bulan sekali. Alasan lain, yaitu karena program pendidikan non formal adalah program yang mempunyai falsafah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga bentuk pembinaanya juga disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masyarakat.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. indikator keberhasilan PKBM Baitul Muslimin memiliki kesesuaian dengan indikator keberhasilan PKBM menurut patokan Diknas. Adapun sepuluh indikator keberhasilan PKBM Baitul Muslimin meliputi: 1) adanya variasi peserta didik yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu daerah asal warga belajar dan variasi tingkatan umur warga belajar di PKBM Baitul Muslimin, 2) memiliki tutor dengan kualifikasi pendidikan rata-rata strata-1 dan mata pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, 3) status penyelenggara PKBM dari kepengurusan Masjid Baitul Muslimin, 4) memiliki sarana dan prasarana lebih dari standar minimal sarana prasarana PKBM, 5) memiliki dua gedung milik sendiri, 6) sumber dana dari kerjasama dengan perusahaan, 7) hasil pembelajaran melibatkan peserta didik, 8) variasi program belajar yang berjumlah dua belas program yaitu TPQ, Maddien, Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, KBU, Life Skill, PAUD, KF, TBM, PG-PQ dan PG Maddien, 9) hasil belajar dapat dijadikan bekal untuk berusaha mandiri, bekerja sebagai karyawan dan melanjutkan pendidikan, 10) partisipasi masyarakat sangat besar berupa pemberian dana, tanah dan kerjasama.
2. keberhasilan PKBM Baitul Muslimin banyak didukung dengan beberapa faktor antara lain (a) kelembagaan PKBM, (b) sarana prasarana yang memadai, (c) sumber daya manusia yang berkualitas, (d) strategi manajemen, (e) partisipasi masyarakat, (f) pendanaan dari kerjasama, (g) sosialisasi, (h) keterkaitan semua unsur, (i) manfaat untuk masyarakat.
3. pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin terdiri dari empat hal yaitu: a. penyelenggaraan program pendidikan non formal melibatkan tokoh masyarakat, adapun tokoh masyarakat yang dilibatkan adalah

- takmir masjid, kiai, camat dan ustadz/guru. Sedangkan pelibatan tokoh masyarakat di PKBM Baitul Muslimin adalah sebagai penasehat, pembina, penyelenggaran dan sosialisasi. b. program pendidikan non formal berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, program yang diselenggarakan di PKBM Baitul Muslimin berdasarkan kebutuhan melalui identifikasi kebutuhan program yang dilakukan oleh pengurus PKBM dan tokoh masyarakat, c. program pendidikan non formal berbasis agama artinya pembelajaran disisipi dengan pengetahuan agama. Setiap pembelajaran pada masing-masing program di padukan dengan pengetahuan agama seperti kajian-kajian islam, dalil islam, petunjuk dan tata cara menurut agama islam, dan d. menerapkan strategi manajemen PDCA (*Plan, Do, Check dan Action*). Manajemen PDCA (*Plan, do, check, action*) diterapkan dalam pengelolaan program-program pendidikan non formal di PKBM Baitul Muslimin. Dimulai dengan *plan* yaitu membuat perencanaan program terkait dengan pembelajarannya, pembinaanya, pendanaanya, evaluasi dan target yang dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan *do*, yaitu pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat. *Check*, dilakukan pengawasan untuk mengontrol apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Dan *action*, suatu tindakan perbaikan untuk membawa program sesuai dengan perencanaan.
4. rasional penerapan pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non forma di PKBM Baitul Muslimin adalah karena adanya kecocokan antara strategi manajemen yang digunakan dengan kondisi program pendidikan non formal dan di padukan dengan latar belakang masyarakat. Kecocokan tersebut terkait dengan pendidikan non formal yang fleksibel sehingga sangat sesuai dengan manajemen PDCA sebagai pengendali mutu, dengan demikian program-program pendidikan non formal dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

B. Saran

1. Pihak-pihak pembuat kebijakan pendidikan non formal informal disarankan untuk merancang pola pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masyarakat setempat, karena pembinaan tidak dapat dilakukan dengan prosedur *top-down* melainkan harus melihat kondisi masyarakat setempat seperti halnya dengan hasil temuan dalam penelitian ini.
2. Pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan non formal disarankan untuk mempergunakan pola pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini, supaya program pendidikan non formal dapat berkembang dengan baik.
3. Bagi peneliti lain, apabila terdapat kajian sebagai upaya meningkatkan pembinaan penyelenggaraan program pendidikan non formal dengan mengacu pada pola pembinaan dari hasil penelitian diatas, peneliti siap untuk berbagi pengalaman.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Kusmiadi. 2006. Pola Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Jurnal PNF Visi Vol 1 No 1.
- Brembeek, C.S. 1973. New Strategis for Educational Development. Lexington:DC Health and Company
- Coombs, P.H. & Ahmed, M. 1974. Attacking Rural Poverty. Baltimore The John Hopkins University Press.
- Endro Haryanto. 2007. Peran dan Standar Kompetensi Penilik. Jakarta; Jurnal VISI,Dirjen PTK-PNF
- Gaffar. Fakry. 2007. Manajemen Pendidikan (dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan). Bandung: Pedagogiana Press.
- Kamil, Mustofa. 2009. Pendidikan Non Formal. Bandung: Alfabeta
- Kamid, Asngadi. 2003. Kinerja Penilik Pendidikan Luar Sekolah dalam Penyelenggaraan Program Paket B di Kalimantan Tengah. Malang: Tesis tidak dipublikasikan

- Knowles, Malcom. 1984. The Modern Practice of Adult Education, Andragogy versus Pedagogy. New York: Assosiation Press
- Marzuki. Saleh. 2009. Dimensi-dimensi Pendidikan Non Formal. Malang: FIP Universitas Negeri Malang
- Muhammad, H. 2010. Jaga Mutu, Kemdiknas Tertibkan Lembaga PNFI. (<http://www.antaraneews.com>), diakses 30 Juni 2010
- Muhammad, H. 2010. PKBM dan Lembaga Kursus Nakal Ditertibkan. (<http://www.pnfi.kemdiknas.go.id>), diakses 20 Maret 2010
- Muhammad. H. 2010. Sosialisasi Penertiban Program PNF. (<http://www.pnfi.kemdiknas.go.id>), diakses 4 April 2010
- Muhammad, H. 2009. Kondisi dan Tantangan PNFI (disajikan dalam kuliah umum di Pascasarjana (November 2009), Universitas Negeri Malang.
- Siagian. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta; Bumi Aksara
- Soetopo. 2003. Manajemen Pendidikan & Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan. Malang: UM
- Subhan. Soleh. 2010. Ribuan PNFI Ternyata Fiktif. <http://www.diknas.go>. (diakses pada 26 Agustus 2010)
- Sulaiman. Idik. 1991. Pembinaan dan Pengembangan Program. Jakarta: Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar& Menengah.
- Sudjana.D.J 2004. Manajemen Program Pendidikan (untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Bandung: Falah Production
- Sudjana.D.J 2006. Evaluasi Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Terry. 2009. Dasar-dasar Menajemen. Bandung: Bumi Aksara
- Tim Dosen UPI. 2009. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. 2003. UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Bandung: Citra Umbara
- Yin. Robert. 1996. Studi Kasus Desain & Model (diterjemahkan oleh M. Djauzi Modzakir). Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2005. Keputusan Menpan No.19/KEP/MENPAN/3/2005. Jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Jakarta: Lembaran Negara
- Dirjen PTK PNF. 2004. Kebijakan dan program, pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal. Jakarta: Ditjen PMPTK